



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam upaya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba yang wilayah pengawasannya meliputi seluruh Kabupaten Bulukumba, maka perlu mengatur Pembagian Wilayah Pengawasan Lingkup Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wilayah pengawasan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektur Pembantu.
7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Pejabat Eselon III-A yang bertugas membantu Inspektur Kabupaten dalam melakukan pengawasan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bulukumba yang di pimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Bulukumba.

BAB II WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Wilayah pengawasan terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa dan Kelurahan.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (3) Pembagian wilayah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
 NOMOR : 20 Tahun 2019
 TANGGAL : 4 Februari 2019
 TENTANG : PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT
 DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.

1. Obyek Pengawasan dan Penetapan Risiko Inspektur Wilayah I :

| No | Nama OPD | Peta Risiko |
|-----------|---|--------------------|
| 1) | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; | Tinggi |
| 2) | Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sultan DG Radja; | Tinggi |
| 3) | Sekretariat Daerah; | Tinggi |
| 4) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; | Sedang |
| 5) | Dinas Lingkungan dan Kehutanan; | Tinggi |
| 6) | Dinas Pariwisata; | Sedang |
| 7) | Dinas Sosial; | Sedang |
| 8) | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Sedang |
| 9) | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; | Sedang |
| 10) | Kecamatan Gantarang; | Rendah |
| 11) | Kelurahan Matekko; | Rendah |
| 12) | Kelurahan Jalanjang; | Rendah |
| 13) | Kelurahan Mario Rennu; | Rendah |
| 14) | Desa Bontomacinna; | Sedang |
| 15) | Desa Gattareng; | Sedang |
| 16) | Desa Bialo; | Sedang |
| 17) | Desa Bontosunggu; | Sedang |
| 18) | Desa Dampang; | Sedang |
| 19) | Desa Bontonyeleng; | Sedang |
| 20) | Desa Padang; | Sedang |
| 21) | Desa Bontoraja; | Sedang |
| 22) | Desa Benteng Malewang; | Sedang |
| 23) | Desa Benteng Gattareng; | Sedang |
| 24) | Desa Paenre Lompoa; | Sedang |
| 25) | Desa Bukit Harapan; | Sedang |
| 26) | Desa Polewali; | Sedang |
| 27) | Desa Barombong; | Sedang |
| 28) | Desa Bukit Tinggi; | Sedang |
| 29) | Desa Bontomasila; | Sedang |
| 30) | Desa Palambarae; | Sedang |
| 31) | Desa Taccorong; | Sedang |

| | | |
|-----|-----------------------|--------|
| 32) | Kecamatan Ujung Loe; | Sedang |
| 33) | Kelurahan Dannaung; | Sedang |
| 34) | Desa Seppang; | Sedang |
| 35) | Desa Garanta; | Sedang |
| 36) | Desa Balleanging; | Sedang |
| 37) | Desa Balong; | Sedang |
| 38) | Desa Manyampa; | Sedang |
| 39) | Desa Tamatto; | Sedang |
| 40) | Desa Padangloang; | Sedang |
| 41) | Desa Manjalling; | Sedang |
| 42) | Desa Lonrong; | Sedang |
| 43) | Desa Bijawang; | Sedang |
| 44) | Desa Salemba; | Sedang |
| 45) | Desa Paccarammingang. | Sedang |

2. Obyek Pengawasan dan Penetapan Risiko Inspektur Wilayah II:

| No | Nama OPD | Peta Risiko |
|-----------|---|--------------------|
| 1) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; | Tinggi |
| 2) | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; | Tinggi |
| 3) | Badan Pengelola Keuangan Daerah; | Tinggi |
| 4) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; | Sedang |
| 5) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah; | Sedang |
| 6) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; | Sedang |
| 7) | Dinas Tenaga Kerja; | Sedang |
| 8) | Dinas Pemuda dan Olahraga; | Sedang |
| 9) | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; | Rendah |
| 10) | Kecamatan Ujung Bulu; | Rendah |
| 11) | Kelurahan Bentenge | Rendah |
| 12) | Kelurahan Terang-Terang | Rendah |
| 13) | Kelurahan Tanah Kongkong | Rendah |
| 14) | Kelurahan Bintarore | Rendah |
| 15) | Kelurahan Kalumeme | Rendah |
| 16) | Kelurahan Loka; | Rendah |
| 17) | Kelurahan Kasimpureng; | Rendah |
| 18) | Kelurahan Caile; dan | Rendah |
| 19) | Kelurahan Ela-Ela. | Rendah |

| | | |
|-----|------------------------|--------|
| 20) | Kecamatan Kajang ; | Rendah |
| 21) | Kelurahan Tanah Jaya; | Rendah |
| 22) | Kelurahan Laikang; | Rendah |
| 23) | Desa Lembanna; | Sedang |
| 24) | Desa Possi tanah; | Sedang |
| 25) | Desa Tambangan; | Sedang |
| 26) | Desa Tanah Towa; | Sedang |
| 27) | Desa Bontobiraeng; | Sedang |
| 28) | Desa Lembang; | Sedang |
| 29) | Desa Mattoanging; | Sedang |
| 30) | Desa Bontorannu; | Sedang |
| 31) | Desa Malleleng; | Sedang |
| 32) | Desa Bontobaji; | Sedang |
| 33) | Desa Sapanang; | Sedang |
| 34) | Desa Pattiroang; | Sedang |
| 35) | Desa Batunilamung; | Sedang |
| 36) | Desa Sangkala; | Sedang |
| 37) | Desa Lembang Lohe; | Sedang |
| 38) | Desa Lolisang; | Sedang |
| 39) | Desa Pantama; | Sedang |
| 40) | Kecamatan Herlang ; | Sedang |
| 41) | Kelurahan Tanuntung; | Sedang |
| 42) | Kelurahan Bontokamase; | Sedang |
| 43) | Desa Singa; | Sedang |
| 44) | Desa Karassing; | Sedang |
| 45) | Desa Gunturu; | Sedang |
| 46) | Desa Borong; | Sedang |
| 47) | Desa Tugondeng; dan | Sedang |
| 48) | Desa Pataro. | Sedang |

3. Obyek Pengawasan dan Penetapan Risiko Inspektur Wilayah III

| No | Nama OPD | Peta Risiko |
|-----------|---|--------------------|
| 1) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; | Tinggi |
| 2) | Dinas Perikanan; | Tinggi |
| 3) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; | Tinggi |
| 4) | Dinas Perdagangan dan Perindustrian; | Tinggi |
| 5) | Dinas Perhubungan; | Sedang |
| 6) | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Sedang |

| | | |
|-----|---|--------|
| | Manusia; | |
| 7) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; | Sedang |
| 8) | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; | Sedang |
| 9) | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; | Sedang |
| 10) | Kecamatan Bulukumpa; | Rendah |
| 11) | Kelurahan Tanete; | Rendah |
| 12) | Kelurahan Jawi-Jawi; | Rendah |
| 13) | Kelurahan Ballasaraja; | Rendah |
| 14) | Desa Bontobulaeng; | Sedang |
| 15) | Desa Barugae; | Sedang |
| 16) | Desa Bulo-Bulo; | Sedang |
| 17) | Desa Bontominasa; | Sedang |
| 18) | Desa Salassae; | Sedang |
| 19) | Desa Kambuno; | Sedang |
| 20) | Desa Jojjolo; | Sedang |
| 21) | Desa Sapobonto; | Sedang |
| 22) | Desa Balangpesoang; | Sedang |
| 23) | Desa Batu Lohe; | Sedang |
| 24) | Desa Tibona; | Sedang |
| 25) | Desa Balangtaroang; | Sedang |
| 26) | Desa Bontomangiring; | Sedang |
| 27) | Desa Baruga Riattang; | Sedang |
| 28) | Kecamatan Rilau Ale; | Rendah |
| 29) | Kelurahan Palampang; | Rendah |
| 30) | Desa Bontomanai; | Sedang |
| 31) | Desa Bontobangun; | Sedang |
| 32) | Desa Karama; | Sedang |
| 33) | Desa Bajiminasa; | Sedang |
| 34) | Desa Batukaropa; | Sedang |
| 35) | Desa Bonto Mate'ne; | Sedang |
| 36) | Desa Tanah Harapan; | Sedang |
| 37) | Desa Bontoharu; | Sedang |
| 38) | Desa Bontolohe; | Sedang |
| 39) | Desa Swatani; | Sedang |
| 40) | Desa Bululohe; | Sedang |
| 41) | Desa Anrang; | Sedang |
| 42) | Desa Topanda; dan | Sedang |
| 43) | Desa Pangalloang. | Sedang |

4. Obyek Pengawasan dan Penetapan Risiko Inspektur Wilayah IV

| No | Nama OPD | Peta Risiko |
|-----------|---|--------------------|
| 1) | Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan; | Tinggi |
| 2) | Dinas Kesehatan; | Tinggi |
| 3) | Sekretariat DPRD; | Tinggi |
| 4) | Badan Pendapatan Daerah; | Tinggi |
| 5) | Dinas Komunikasi dan Informatika; | Sedang |
| 6) | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar; | Sedang |
| 7) | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas; | Sedang |
| 8) | Dinas Ketahanan Pangan; | Sedang |
| 9) | Puskesmas; | Rendah |
| 10) | Kecamatan Kindang; | Rendah |
| 11) | Kelurahan Borongrappoa; | Rendah |
| 12) | Desa Kindang; | Rendah |
| 13) | Desa Balibo; | Sedang |
| 14) | Desa Anrihua; | Sedang |
| 15) | Desa Mattirowalie; | Sedang |
| 16) | Desa Garuntungan; | Sedang |
| 17) | Desa Benteng Palioi; | Sedang |
| 18) | Desa Tamaona; | Sedang |
| 19) | Desa Orogading; | Sedang |
| 20) | Desa Sipaenre; | Sedang |
| 21) | Desa Sopa; | Sedang |
| 22) | Desa Somba Palioi; | Sedang |
| 23) | Desa Kahayya; | Sedang |
| 24) | Kecamatan Bonto Bahari; | Rendah |
| 25) | Kelurahan Tanah Lemo; | Rendah |
| 26) | Kelurahan Sapolohe; | Rendah |
| 27) | Kelurahan Benjala; | Rendah |
| 28) | Kelurahan Tanahberu; | Rendah |
| 29) | Kelurahan Tanah Lemo; | Rendah |
| 30) | Desa Ara; | Sedang |
| 31) | Desa Lembanna; | Sedang |
| 32) | Desa Darubia; | Sedang |
| 33) | Desa Bira; | Sedang |
| 34) | Kecamatan Bonto Tiro; | Rendah |
| 35) | Kelurahan Eka Tiro; | Rendah |

| | | |
|-----|-------------------------|--------|
| 36) | Desa Batang; | Sedang |
| 37) | Desa Paku Balaho; | Sedang |
| 38) | Desa Caramming; | Sedang |
| 39) | Desa Bonto Barua; | Sedang |
| 40) | Desa Bonto Tangnga; | Sedang |
| 41) | Desa Tamalanrea; | Sedang |
| 42) | Desa Tritiro; | Sedang |
| 43) | Desa Dwi Tiro; | Sedang |
| 44) | Desa Bonto Marannu; | Sedang |
| 45) | Desa Buhung Bundang; | Sedang |
| 46) | Desa Bonto Bulaeng; dan | Sedang |
| 47) | Desa Lamanda. | Sedang |

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI